

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aljazair merupakan sebuah negara di pesisir Laut Tengah, Afrika Utara. Nama negara ini yang berarti kepulauan (al-jazā'ir, dalam bahasa Arab) mengacu kepada 4 buah pulau yang terletak berdekatan dengan ibu kota sekaligus pusat pemerintahan negara ini, Aljir. Aljazair adalah republik semi-presidensial yang terdiri dari 48 provinsi dan 1.541 komune (wilayah kecil). Dengan jumlah penduduk lebih dari 37 juta jiwa, Aljazair merupakan negara berpenduduk terbanyak ke-34 di Bumi. Dengan ekonomi yang mengandalkan sumber-sumber minyak. Sonatrach merupakan perusahaan minyak nasional yang menjadi perusahaan terbesar di Afrika.

Aljazair memiliki tentara terbesar kedua dengan anggaran pertahanan terbesar di Afrika. Aljazair memiliki Program Nuklir damai sejak dasawarsa 1990-an.¹ Dengan luas keseluruhan 2.381.741 kilometer persegi, Aljazair merupakan negara terluas ke-10 di dunia dan terluas di Afrika, juga di Mediterania. Aljazair adalah anggota Uni Afrika, Liga Arab, OPEC, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Juga merupakan anggota pendiri Uni Arab Maghribi.

Sahara Barat merupakan sebuah daerah di bagian barat laut Afrika di tepi pantai Atlantik. Wilayah Sahara Barat adalah bekas wilayah koloni Spanyol yang

¹ "The Nuclear Vault: The Algerian Nuclear Problem" [Kubah Nuklir: Persoalan Nuklir Aljazair] (dalam Inggris). Gwu.edu. Diakses tanggal 2013-03-14.

berbatasan dengan Aljazair di sebelah timur laut, Maroko di sebelah utara dan dengan Mauritania di sebelah timur dan selatan. Luas wilayah Sahara Barat adalah 284.000 km² dengan jumlah penduduk terbanyak berada di kota terbesar yaitu Laayoune yang juga merupakan ibukota dari Sahara Barat. Tanahnya hampir semua adalah gersang, tetapi kaya sumber mineral fosfat terutama di Bou Craa. Penduduk asli daerah ini menamakan diri Sahrawi.

Sengketa merupakan awal dari konflik antar negara, salah satu konflik berkepanjangan yang tak kunjung usai adalah konflik antara Maroko dan Sahara barat. Konflik Sahara Barat yang terjadi antara Maroko dan Gerakan Kemerdekaan Front Polisario menjadi persoalan yang menyita perhatian dunia, karena konflik sengketa tersebut melibatkan banyak peran negara lainnya seperti Aljazair yang mendukung Front Polisario memperjuangkan kemerdekaan Sahara Barat, serta Amerika Serikat (AS) maupun Prancis yang lebih pro terhadap Maroko. Konflik ini semakin meruncing, karena melibatkan negara muslim di Aljazair. Padahal Sahara Barat juga masih diakui oleh masyarakat internasional sebagai “pemerintahan sendiri” yang tidak diduduki oleh pemerintahan dari negara lain.

Hubungan Aljazair-Maroko cenderung fluktuatif, pada tahun 1912 gelombang kolonialisasi Eropa di benua Afrika pada akhir abad ke-19 Prancis dan Spanyol membagi dua wilayah kerajaan itu. Disaat Perang Dingin juga memberikan konsekuensi baru. Uni Soviet mendorong Aljazair untuk menguasai wilayah Sahara yang ditinggalkan Spanyol. Maroko sempat terlibat dalam perang panjang melawan Polisario yang didukung Aljazair dan negara-negara blok Timur di kawasan itu,

termasuk Libya. Tekanan Aljazair menurun setelah pada tahun 1991 bersamaan dengan kehancuran Uni Soviet.

Di lihat dari sudut subjek hukum internasional , kedua negara yang terlibat dalam sengketa diwilayah Sahara Barat termasuk subjek hukum internasional yaitu Belligerent. Negara Maroko dan Republik Demokratik Arab Sahrawi termasuk subjek Belligerent yaitu kedua negara tersebut terlibat dalam sengketa. Polisario yang menduduki wilayah Sahara Barat berhak untuk mendapat kekuasaan atas wilayah tersebut karena tanpa bantuan dari pihak Maroko Polisario mampu mengusir penjajah.

Pada bulan Oktober 1975, Mahkamah Internasional ICJ (*International Court of Justice*) mengatur pengesahan dari hak masyarakat Sahrawi untuk menentukan nasib sendiri, tetapi Hassan II menolak referendum karena dia menegaskan bahwa daerah Sahara Barat merupakan daerah kekuasaannya.² Raja Hassan II pun tidak puas dengan keputusan yang ditawarkan PBB, lalu ia mengadakan relokasi terhadap 350.000 relawan, tentara dan pemukim Maroko agar tinggal di Sahara Barat. Proyek besar ini pun dikenal sebagai Green March (Gerakan Hijau) karena sesuai dengan warna suci umat islam.³

Aljazair melihat langkah ini hanya sebagai manifestasi terbaru dari keinginan Maroko dalam masalah ekspansi teritorial dan Aljazair pun mulai mendukung Polisario dalam pelaksanaan referendum. Seperti yang selalu menjadi ciri dalam

² Yahia H. Zoubir, "Stalemate in Western Sahara: Ending International Legality." *Middle East Policy*, 14:4 (2007) 161-2

³ Eric Jensen, *Western Sahara: Anatomy of a Stalemate*. (Boulder, Colo: Lynne Rienner Publishers, Inc.,2005) 27.

perselisihan wilayah, setiap pihak merasa paling eksklusif dan memiliki hak menguasai, menjadikan pembicaraan perdamaian semakin terasa sulit.⁴

Aljazair adalah negara yang mendukung gerakan Front Polisario. Namun, dukungan Aljazair terhadap Polisario dan Sahrawi tidak terbatas pada dukungan politik dan kerjasama saja, mereka membiarkan pengungsi dari Sahara Barat untuk menetap dalam perbatasan mereka. Aljazair juga sudah memberikan pendidikan, pelatihan militer serta bantuan ekonomi kepada orang-orang Sahara.

Selain itu, “Aljazair juga memberikan bantuan militer, diplomatik dan logistik kepada Polisario dan SADR (Zoubir, 1998: 150), termasuk penjualan senjata buatan Soviet (Hodges, 1983; Thompson & Adloff, 1980).⁵ Pemerintah Aljazair adalah sebagai pendukung tunggal di daerah Sahara Barat, (Pennel, 2000: 343),⁶ oleh karena itu ada keuntungan besar yang akan dibuat oleh Aljazair melalui monopoli ini.

Dalam kancah perpolitikan internasional, Aljazair diawal tahun 2000 bukanlah menjadi kekuatan politik utama diwilayah Maghribi, terlebih di Afrika. Aljazair dalam kaitannya dengan organisasi-organisasi internasional masih menjadi aktor yang belum mempunyai pengaruh kuat dalam menjalankan aksi-aksi diplomasinya, baik itu terkait dengan kebijakan geopolitiknnya maupun Anti-kolonialismenya terhadap Sahara Barat dan juga bukan sebagai pelopor dalam pembuatan kebijakan yang menyangkut diplomasi-diplomasi di organisasi

⁴ Steven R. Ratner, “Land Feuds and Their Solutions: Finding International Law beyond the Tribunal Chamber” *The American Journal of International Law*, 100: 4. (Oct. 2006) 811

⁵ Humphrey Susan, *The Western Sahara* dalam <http://atlismta.org/online-journals/0809-journal-intervention/the-western-sahara-conflict/>

⁶ *Ibid*

internasional. Walaupun pernah menjadi inspirasi negara-negara lain karena pernah mengusir penjajah tanpa bantuan negara lain, tetapi menjadi di-*underestimate* oleh lawan politiknya khususnya pada Maroko karena selalu mengungkit isu aneksasi Sahara Barat.

Namun, Aljazair pada abad ke-21 telah menjadi kekuatan dalam kerjasama kebijakan ekonomi dan keamanan di kawasan Mediterranean.⁷ Meskipun pengaruh di daerah ini meningkat, Aljazair masih belum dapat menegosiasikan dukungan Eropa untuk menghindari referendum panjang pada Rakyat Sahrawi.

Diawal zaman milenium ini Aljazair telah hadir sebagai aktor utama dalam Perang Melawan Teror dan telah menjadi pemain utama dalam Uni Afrika (AU) yang menginisiatif badan pembentukan anti-terorisme. Didalam Uni Afrika (AU), aljazair memfokuskan haluan negaranya untuk mendukung pembebasan gerakan nasional, persatuan Afrika dan bursa ekonomi global. Karena Aljazair mampu mendapatkan legitimasi yang diperoleh melalui keterlibatan mereka dalam perang anti-kolonial melawan Perancis nasionalis, maka ia mempunyai peran kepemimpinan dalam AU.

Uni Afrika (AU) adalah sebuah serikat benua yang terdiri dari 54 negara di Afrika. Didirikan pada tanggal 26 Mei 2001 di Addis Ababa, Ethiopia dan diluncurkan pada 9 Juli 2002 di Afrika Selatan,⁸ dengan tujuan menggantikan Organisasi Persatuan Afrika (OAU). Keputusan yang paling penting dari AU yang

⁷ Yahia H. Zoubir "The Resurgence of Algeria's Foreign Policy in the Twenty-First Century." *The Journal of North African Studies*. 9: 2 (2004) 174-6

⁸ Thabo Mbeki (9 July 2002). "Launch of the African Union, 9 July 2002: Address by the chairperson of the AU, President Thabo Mbeki". ABSA Stadium, Durban, South Africa: africa-union.org. Retrieved 8 February 2009.

dibuat oleh Majelis Uni Afrika, pertemuan semi-tahunan kepala negara dan pemerintahan negara-negara anggotanya. sekretariat AU, Komisi Uni Afrika, yang berbasis di Addis Ababa. Karena Aljazair mampu mendapatkan legitimasi yang diperoleh melalui keterlibatan mereka dalam perang anti-kolonial melawan Perancis nasionalis, maka ia mempunyai peran kepemimpinan dalam AU.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, pokok permasalahannya adalah : Mengapa Aljazair terlibat dalam konflik Maroko-Sahara Barat direntang tahun 2000 hingga 2013?

C. Kerangka Dasar Teori

1. Teori Kebijakan Luar Negeri

Menurut Joshua Goldstein mengatakan bahwa pengertian Kebijakan Luar Negeri adalah strategi-strategi yang diambil oleh pemerintah dalam menentukan aksi mereka di dunia internasional.⁹ Sedangkan menurut K.J. Holsti, kebijakan luar negeri adalah tindakan atau gagasan yang dirancang untuk memecahkan masalah atau membuat perubahan dalam suatu lingkungan.¹⁰

⁹ Joshua Goldstein, *International Relations* (New York: Longman, 1999), 147.

¹⁰ K.J. Holsti, *International Politics : A Framework for Analysis* (New Jersey: Prentice-Hall, 1983) 107.

Tiap negara memiliki perbedaan tujuan kebijakan luar negerinya. Namun, negara mengeluarkan kebijakannya untuk memenuhi dan mencapai kepentingan pribadi maupun kolektifnya. Pada umumnya kebijakan luar negeri suatu negara dilakukan agar dapat mempunyai pengaruh terhadap negara lain, menjaga keamanan nasional, memiliki prestise, serta benefit untuk negaranya. Mereka bertindak berdasarkan sumber daya yang ada. Menurut Rosenau tujuan dari kebijakan luar negeri sebenarnya merupakan fungsi dari proses dimana tujuan negara disusun. Tujuan tersebut dipengaruhi oleh sasaran yang dilihat dari masa lalu dan aspirasi untuk masa yang akan datang.¹¹ KJ. Holsti membagi tujuannya menjadi tiga kriteria utama, sebagai berikut:

1. Nilai, yang diletakkan pada tujuan negara, sebagai faktor utama mendorong pembuat kebijakan, hal itu dilakukan berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan.
2. Unsur Waktu, jangka waktu untuk mencapai tujuan.
3. Jenis tuntutan tujuan, negara tujuan akan dibebankan dari negara yang mengeluarkan kebijakan luar negeri.¹²

Menurut KJ. Holsti, dua tujuan yang lebih dominan dalam negara adalah, tujuan jangka menengah dan jangka panjang. Tujuan jangka menengah adalah meningkatkan

¹¹ James N. Rosenau. *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*, (New York: The Free Press, 1969), 167.

¹² K. J. Holsti. *Op. Cit.*, 145.

prestise negara dalam sistem itu, indikator ini dinilai berdasarkan industri, teknologi bantuan dana, dan militer.¹³

Sedangkan Tujuan jangka panjang adalah rencana, impian dan pandangan mengenai organisasi politik atau ideology terakhir dalam sistem internasional, ideologi tersebut merupakan aturan yang mengatur tindakan negara dalam sistem internasional.¹⁴ Bagi Rosenau tujuan jangka panjang adalah untuk perdamaian, kekuasaan dan keamanan.¹⁵

2. Konsep Geopolitik

Geopolitik berasal dari dua kata, yaitu “geo” dan “politik“. Maka, pengertian geopolitik tidak terlepas dari pembahasan mengenai masalah geografi dan politik. “Geo” artinya Bumi/Planet Bumi. Menurut Preston E. James, geografi mempersoalkan tata ruang, yaitu sistem dalam hal menempati suatu ruang di permukaan Bumi. Dengan demikian geografi bersangkutan-paut dengan interrelasi antara manusia dengan lingkungan tempat hidupnya. Sedangkan politik, selalu berhubungan dengan kekuasaan atau pemerintahan.

Dalam studi Hubungan Internasional, geopolitik merupakan suatu kajian yang melihat masalah/hubungan internasional dari sudut pandang ruang atau geosentrik. Konteks teritorial di mana hubungan itu terjadi bervariasi dalam fungsi wilayah dalam interaksi, lingkup wilayah, dan hirarki aktor: dari nasional, internasional,

¹³ Ibid., 146

¹⁴ Ibid., 147

¹⁵ James N. Rosenau. Op. Cit., 167.

sampai benua-kawasan, juga provinsi atau lokal. Pengertian geopolitik dapat disederhanakan lagi, geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah dan ilmu sosial, dengan merujuk kepada percaturan politik internasional. Geopolitik mengkaji makna strategis dan politis suatu wilayah geografi, yang mencakup lokasi, luas serta sumber daya alam wilayah tersebut.

Geopolitik mempunyai 4 unsur pembangun, yaitu keadaan geografis, politik dan strategi, hubungan timbal balik antara geografi dan politik, serta unsur kebijaksanaan.

Negara tidak akan pernah mencapai persamaan yang sempurna dalam segala hal. Keadaan suatu negara akan selalu sejalan dengan kondisi dari kawasan geografis yang mereka tempati. Hal yang paling utama dalam mempengaruhi keadaan suatu negara adalah kawasan yang berada di sekitar negara itu sendiri, atau dengan kata lain, negara-negara yang berada di sekitar (negara tetangga) memiliki pengaruh yang besar terhadap penyelenggaraan suatu negara.

Peranan-Peranan Geopolitik. (Menurut Preston E. James)

1. Berusaha menghubungkan kekuasaan negara dengan potensi alam yang tersedia.
2. Menghubungkan kebijaksanaan suatu pemerintahan dengan situasi dan kondisi alam.
3. Menentukan bentuk dan corak politik luar dan dalam negeri.
4. Menggariskan pokok-pokok haluan negara, misalnya pembangunan.

5. Berusaha untuk meningkatkan posisi dan kedudukan suatu negara berdasarkan teori negara sebagai organisme, dan teori-teori geopolitik lainnya.

6. Membenarkan tindakan-tindakan ekspansi yang dijalankan oleh suatu negara.

Geopolitik menurut Para ahli:

1. Friedrich Ratzel

Friedrich Ratzel (1844-1904), seorang ahli geografi Jerman, menciptakan istilah *anthropogeography* yang berarti suatu sintesa dari geografi, antropologi dan politik. Dari situ, disiplin baru geografi dan politik lahir di Jerman pada abad ke-19. Disiplin baru geografi politik itu diarahkan untuk mempelajari manusia, negara dan dunia sebagai unit-unit organis.¹⁶ Ratzel menyatakan bahwa negara dalam hal-hal tertentu dapat disamakan dengan organism, yaitu mengalami fase kehidupan dalam kombinasi dua atau lebih antara lahir, tumbuh, berkembang, mencapai puncak, surut dan mati. Inti ajaran Ratzel adalah teori ruang yang ditempati oleh kelompok-kelompok politik (negara-negara) yang mengembangkan hukum ekspansionisme baik di bidang gagasan, perutusan maupun produk.

Untuk membuktikan keunggulan yakni negara harus mengambil dan menguasai satuan-satuan politik yang berkaitan terutama yang bernilai strategis dan ekonomis. Ratzel memprediksi bahwa pada akhirnya di dunia ini hanya tinggal negara unggul bisa bertahan hidup dan menjamin kelangsungan hidupnya.

¹⁶ E.Dougherty James, Robert L.Pfaltzgraff Jr. Teori-Teori Hubungan Internasional; Sebuah Survei Komprehensif. Alih Bahasa oleh Bambang Wahyu Nugroho Hal.59

Pertumbuhan negara dapat dianalogikan (disamakan/mirip) dengan pertumbuhan organisme (mahluk hidup) yang memerlukan ruang hidup, melalui proses, lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup tetapi dapat juga menyusut dan mati.

Negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan. Makin luas potensi ruang makin memungkinkan kelompok politik itu tumbuh (teori ruang). Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul yang dapat bertahan hidup terus dan langgeng. Semakin tinggi budaya bangsa semakin besar kebutuhan atau dukungan sumber daya alam. Apabila tidak terpenuhi maka bangsa tersebut akan mencari pemenuhan kebutuhan kekayaan alam diluar wilayahnya (ekspansi).

2. Rudolf Kjellen (1864 – 1922)

Rudolf Kjellen, seorang geographer Swedia pertama kali menggunakan istilah “geopolitik”, ketika melukiskan basis geopolitik kekuatan nasional. Berpegang pada teori organis tentang Negara, ia berpendapat bahwa Negara, seperti hewan dalam teori Darwin, terlibat dalam perjuangan untuk mempertahankan hidup. Negara-negara mempunyai batas-batas, sebuah ibukota, jalur-jalur komunikasi, maupun suatu kesadaran dan kebudayaan. Walaupun Kjellen menulis secara metafisis dan melekatkan pada Negara itu sifat-sifat organisme hidup, ia berkesimpulan bahwa

“pada akhirnya kehidupan Negara ada ditangan individu-individu”.¹⁷ Ia menganggap munculnya beberapa Negara besar sebagai akibat adanya usaha Negara kuat untuk berekspansi.

Dalam periode antara dua perang dunia, pengikut Kjellen dan Retzel menggunakan geopolitik untuk mengembangkan suatu kerangka ekspansi nasional Jerman. Karl Haushofer (1869-1946) seorang pensiunan opsir mendirikan Akademi Jerman di Munich pada tahun 1925, bersama jurnal *Zeitschrift fur Geopolitik*. Keduanya memperoleh bantuan aktif dari Reich ketiga (Third Reich).¹⁸ Pengaruh Haushofer cukup besar dikalangan militer dan dianggap menjadi salah satu penasehat politik Hitler yang sangat menentukan.

3. Karl Houshoffer (Teori Ekspansionisme : 1896-1946)

Karl Houshoffer mengajarkan paham geopolitik sebagai ajaran ekspansionisme dalam bentuk politik geografi yang menitikberatkan pada soal-soal strategi perbatasan, ruang hidup bangsa dan tekanan rasial, ekonomi dan sosial sebagai faktor yang mengharuskan pembagian baru kekayaan dunia. Inti paham geopolitik Houshoffer pada dasarnya adalah penyempurnaan teori Kjellen, yaitu : (a) Kekuasaan imperium daratan pada akhirnya menguasai imperium lautan (b) Akan timbul negara-negara besar di Eropa, Asia dan Afrika. Prediksi Houshoffer tersebut,

¹⁷ Sidney Verba, Klaus Knorr, Woodrow Wilson School of Public and International Affairs. Center of International Studies. Princeton, New Jersey. *The International System: Theoretical Essays* (Princeton University Press, 1961), hal. 77-92

¹⁸ Kenneth N. Waltz, *Man, The State, and War: A Theoretical Analysis* (New York Columbia University Press, 1959 dan oleh pengarang yang sam, *Theory of International Politics* (Reading Mass: Addison Wesley Publishing Company, 1979), khususnya bab 4.

dalam banyak hal telah mendorong lahirnya Nazi Jerman di bawah Hitler yang bersemboyan Jerman Raya di atas semua Negara, sedangkan di Asia lahir chauvinisme Jepang dengan semboyan Hako I Chiu yaitu menjadikan Jepang sebagai pemimpin Asia, cahaya Asia dan pelopor Asia (Tiga A).

Pandangan Karl Haushofer ini berkembang di Jerman dibawah kekuasaan Aldof Hitler, juga dikembangkan ke Jepang dalam ajaran Hako Ichu yang dilandasi oleh semangat militerisme dan fasisme. Pokok– pokok teori Haushofer ini pada dasarnya menganut teori Kjellen, yaitu sebagai berikut :

Kekuasan imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan imperium maritim untuk menguasai pengawasan dilaut. Negara besar didunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, dan Asia barat (Jerman dan Italia) serta Jepang di Asia timur raya.

Geopolitik adalah doktrin negara yang menitik beratkan pada soal strategi perbatasan. Geopolitik adalah landasan bagi tindakan politik dalam perjuangan kelangsungan hidup untuk mendapatkan ruang hidup (wilayah). Saat Maroko ingin menyatukan kembali wilayahnya, setting politik global sudah berubah. Dunia berada di tengah Perang Dingin antara blok Timur dan blok Barat yang masing-masing ingin mempertahankan dan memperluas wilayah pengaruhnya.

Dalam kaitannya teori Kebijakan luar negeri dan konsep geopolitik, maka bisa dijabarkan bahwa, ketika Aljazair bergabung dengan blok Timur berusaha untuk mendapatkan wilayah yang baru ditinggalkan Spanyol sehingga bisa memiliki

pengaruh di Afrika dan akses ke Samudera Atlantik. Untuk mencapai keinginan tersebut, Aljazair sejak secara aktif memberikan dukungan kepada kelompok Polisario yang mereka tampung di kamp Tindouf di Aljazair.

Revolusi Aljazair dan komitmennya untuk menentukan nasib sendiri dan nasionalisme secara historis dipengaruhi kebijakan luar negerinya. Berjanji untuk menegakkan dan memajukan revolusi melawan imperialisme, Aljazair telah menjadi pemimpin terkemuka di kedua wilayah dan negara berkembang.

Disaat itu pula Aljazair mendapatkan peluang lebih baik ketika mampu mendukung Polisario dalam bentuk politik maupun dalam mengambil hati masyarakat Sahrawi dan juga negara internasional. Ketika dukungan politik menjadi lebih kuat dikawasan Maghribi maupun Afrika, terdapat peluang lebar dalam mengambil hati Front Polisario maupun rakyat Sahrawi hingga akan menjadikan Aljazair dipercaya dalam hubungan bilateral yang lebih intens. Aksi ini akan menguntungkan Aljazair karena selama ini sumber daya alam Sahara Barat yang bertahun-tahun telah dieksplorasi oleh Maroko akan menjadikan peralihan kegiatan ekonomi khususnya bahan hasil bumi menjadi milik Aljazair. Hasil bumi yang cukup besar di Afrika ini akan membuat Aljazair menjadi pemilik Fosfat dan Gas alam terbesar di Afrika.

Menjadi persolan dimasa sekarang (2000-2013) dimana satu-satunya kolonisasi terakhir di Afrika masih terjadi di wilayah *southwest* Aljazair, yaitu Sahara Barat. Sedangkan geopolitik aljazair yang menganut asas dekolonisasi, dan non-

terrorist menjadi salah satu kebijakan populer mereka dalam memperjuangkan pengaruh politiknya di Afrika. Sehingga mampu menjadi panutan negara-negara lain dalam menolak berbagai intervensi maupun penganeksasian wilayah oleh negara atau bangsa lain.

D. Hipotesa

Setelah menganalisis berbagai data-data yang dikumpulkan oleh peneliti sebelumnya dan mengarah pada rumusan masalah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

Aljazair terlibat dalam konflik Maroko-Sahara Barat direntang tahun 2000 hingga 2013 karena:

1. Memperkuat pengaruh politik yang lebih kuat di kawasan Maghribi-Afrika.
2. Mendapatkan akses terhadap sumber daya alam dan gas di Sahara Barat.

E. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Menjabarkan konflik antara Maroko dengan Sahara Barat
2. Untuk mengetahui mengapa Aljazair terlibat dalam konflik Maroko-Sahara Barat.

3. Sebagai upaya memenuhi syarat Tugas Akhir dalam menyelesaikan program Strata 1 pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini akan menjelaskan mengenai keterlibatan Aljazair dalam konflik Maroko-Sahara Barat. Penelitian ini menyangkup dua hal: yaitu dibatasi dari tahun 2000-2013 dan ruang lingkupnya yaitu Aljazair sebagai aktor utama, dan negara Maroko dengan Sahara Barat sebagai pihak yang berkonflik. Dan yang menjadi pihak berkepentingan yaitu Aljazair dalam mendapatkan pengaruh politik yang kuat di Afrika, menjadi negara yang anti dekolonisasi di wilayah Afrika khususnya pada daerah Sahara Barat dan Dikarenakan Aljazair melihat adanya peluang mendapatkan kandungan sumber daya alam dan gas di Sahara Barat..

G. Metode Penelitian

Didalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode kualitatif. Yaitu dengan teknik pengumpulan data dengan mencari studi pustaka dan dokumentasi data dengan cara melalui dokumen, buku, makalah, jurnal internasional dan sumber *website* yang terpercaya sebagai acuan dan kerangka pedoman teori untuk mengkaji masalah yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Bab I: Berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar teori, hipotesa, tujuan penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang demografi dan dinamika kondisi sosiasl-politik Aljazair yang terdiri dari sub bab kondisi geografis dan demografi Aljazair, sejarah negara Aljazair, sistem politik dan pemerintahan Aljazair, politik dalam negeri Aljazair serta kebijakan luar negeri Aljazair.

Bab III berisi tentang Dinamika konflik Maroko-Sahara Barat. Dengan sub-bab sebagai berikut; Profil singkat Maroko-Sahara Barat, latar belakang konflik Maroko-Sahara Barat, sejarah konflik perbatasan Maroko-Sahara Barat, awal mula terjadinya konflik Aljazair-Maroko, dan terlibatnya PBB dalam konflik ini.

Bab IV berisi tentang keterlibatan Aljazair dalam konflik Maroko-Sahara Barat dengan sub bab sebagai berikut, babak baru persetujuan Aljazair-Maroko, Uni Afrika dan kebijakan luar negeri Aljazair, dan Perebutan sumber daya mineral di Sahara Barat.

Bab V berisi kesimpulan yang merupakan rangkuman-rangkuman dari penjelasan-penjelasan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya dari bab II hingga bab IV, sekaligus merupakan penutup dalam skripsi ini.